

ABSTRAK

Liberalisasi Data, sebuah konsep yang gencar dibahas dalam diskusi politik digital, mempunyai potensi besar dalam mendorong inovasi, transparansi, dan efisiensi dalam menggunakan potensi data. Namun seperti halnya rumah tanpa pintu, akses terbuka pada arus data dapat mengundang tantangan dan ancaman. India menjadi salah satu negara yang menolak inisiatif penerapan konsep liberalisasi data, yaitu Osaka Track yang dirancang untuk membentuk kerjasama data terbuka lintas negara.

India sebagai negara dengan prospek digitalisasi yang besar justru menerapkan kebijakan lokalisasi data, sebuah kebijakan yang membuat arus data suatu negara terjaga dalam batas-batas di dalam negeri.

Penelitian ini mencoba membuka fenomena tersebut, dengan analisis power dan sovereignty pada alasan India mengambil kebijakan protektif akan arus datanya serta implikasinya terhadap tujuan keamanan dan ekonomi digital yang sesuai dengan kepentingan nasional India.

ABSTRACT

Data Liberalization, a concept that is intensively discussed in digital politics, has great potential in encouraging innovation, transparency and efficiency in using the potential of data. However, like a house without doors, open access to data flows can invite challenges and threats. India is one of the countries that rejects the initiative to implement the concept of data liberalization, namely the Osaka Track which is designed to form open data cooperation across countries.

India, as a country with great digitalization prospects, has actually implemented a data localization policy, a policy that ensures a country's data flow is maintained within domestic borders.

This research tries to uncover this phenomenon, with a power and sovereignty analysis on the reasons why India adopted a protective policy regarding its data flows and its implications for digital security and economic goals that are in line with India's national interests.